

Kosmopolitanisme dan Nasionalisme Prancis dalam Proses Integrasi Eropa *

Agnes Rosari Dewi

*Mahasiswa Program Magister Hubungan Internasional
Universitas Airlangga
(E-mail: agnes.rosari@gmail.com)*

ABSTRACT

The article examines the influence of cosmopolitanism and nationalism in France on the process of European integration. Cosmopolitanism was seen as an impetus for the process of European integration. Cosmopolitanism was reflected in the attitude of French government who strongly supported the process of European integration. While nationalism was seen in sense of euroscepticism that could harm the process of European integration. Nationalism was reflected in the attitude of French parliament and people who showed less supports to the process of European integration.

Keywords: *cosmopolitanism, nationalism, France, European integration*

Prancis merupakan salah satu negara kuat di kawasan Eropa. Prancis menjadi kekuatan besar di Eropa karena wilayahnya yang luas, lokasi yang strategis, peran sentral dalam integrasi Eropa, serta pola-pola diplomasinya yang aktif. Prancis, sejak dirintisnya proyek integrasi Eropa, berperan besar terutama dalam menguatkan integrasi ekonomi dan politik di Eropa. Peran Prancis dalam proses integrasi Eropa telah dirintis sejak tahun 1945. Proyek besar integrasi Eropa ini dirintis untuk tiga tujuan utama: mengakhiri konflik yang berlangsung selama Perang Dunia I dan II, kebutuhan untuk menciptakan stabilitas keamanan di

* Artikel ini merupakan ringkasan skripsi penulis pada Program Studi S1 Ilmu Hubungan Internasional Universitas Airlangga (2009).

tengah situasi Perang Dingin, serta untuk menciptakan kawasan ekonomi Eropa yang akan diikuti dengan integrasi politik dan sosial yang akhirnya menciptakan perdamaian di kawasan (<http://www.diplomatie.gouv.fr>, 12 Maret 2009).

Prancis sebagai negara yang memiliki pengaruh besar dalam proses integrasi Eropa mengedepankan sikap-sikap solidarisme yang tinggi terkait dengan perannya dalam proses tersebut. Peran yang dominan tidak terlepas dari kehendak kuat pemerintah yang berkuasa dan para elit politik di Prancis untuk memajukan integrasi Eropa. Selama lima dekade perkembangan integrasi Eropa, Prancis menjadi negara yang berperan aktif dalam memajukan proses integrasi Eropa.

Peran sentral Prancis dalam proses integrasi Eropa telah berlangsung sejak awal kemunculan wacana integrasi. Inisiatif membangun proyek besar penyatuan Eropa ini datang dari negarawan Prancis, Jean Monnet (Microsoft Encarta 2007). Perintis proyek Eropa ini mendorong para pemimpin Eropa untuk membawa kerja sama antar negara Eropa ke dalam satu organisasi. Tujuan utama pembentukan organisasi ini yaitu untuk mengatur solidaritas ekonomi antar negara dan dalam jangka panjang membawa mereka lebih dekat pula secara politik. Organisasi rintisan proyek integrasi Eropa ini terwujud dengan berdirinya the European Coal and Steel Community (ECSC) (Microsoft Encarta 2007) pada 18 April 1951 (<http://www.diplomatie.gouv.fr>, 12 Maret 2009).

Selama perkembangan integrasi Eropa, mulai dari ditandatanganinya *the Treaty of Rome* tahun 1957 sampai pembentukan European Union (Uni Eropa – UE) melalui Perjanjian Maastricht (Microsoft Encarta 2007) tahun 1992, Prancis berperan besar untuk mendorong berlanjutnya proses integrasi Eropa. Pemerintah eksekutif Prancis secara konsisten mendukung integrasi Eropa dalam kerangka institusi UE. Salah satu negarawan Prancis yang berkontribusi besar dalam UE yaitu Jacques Delors, yang menjadi presiden the European Commission, sejak tahun 1984 sampai 1994 (Adams 2006).

Kepercayaan diri serta dukungan besar pemerintah Prancis terhadap proses integrasi Eropa menunjukkan gejala kosmopolitanisme. Kecenderungan kosmopolitanisme ini terlihat dengan solidaritas pemerintah Prancis terhadap kesepakatan-kesepakatan serta perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam kerangka Uni Eropa. Dengan kata lain, kecenderungan kosmopolitanisme terlihat dalam sikap pemerintah Prancis yang sangat pro-European. Kecenderungan kosmopolitanisme ini bahkan berlangsung sejak awal integrasi Eropa. Jean Monnet, salah satu penggagas integrasi Eropa, menyatakan bahwa sudah saatnya Eropa meninggalkan tradisi perang dengan membangun suatu kesatuan suara. Hanya dengan persatuan Eropa, kekuatan serta peran sentral Eropa dalam politik internasional dapat kembali (Urwin 2006).

Dukungan aktif pemerintah Prancis terhadap proses integrasi Eropa tidak diikuti dengan dukungan serupa dari rakyatnya. Sebaliknya, dukungan rakyat Prancis terhadap proses integrasi justru melemah. Hal ini sangat terlihat dalam dua peristiwa penting dalam proses integrasi Eropa, ratifikasi draft konstitusi pada tahun 2005 serta pemberlakuan Perjanjian Maastricht pada 1992. Dukungan terhadap proses integrasi yang melemah tersebut menunjukkan adanya penguatan identitas nasional di kalangan warga negara Prancis.

Pemaparan diatas menunjukkan adanya paradoks dalam sikap pemerintah dan rakyat Prancis. Ketika pemerintah Prancis memiliki kecenderungan sikap kosmopolit, rakyat Prancis menunjukkan sikap nasionalis. Paradoks ini sangat menarik untuk dibahas, mengingat kosmopolitanisme dan nasionalisme merupakan dua hal yang memiliki elemen-elemen yang berlawanan satu sama lain (Susanto 2009). Ketika dua hal yang berlawanan terjadi secara bersamaan tentunya akan terjadi saling tarik-menarik di antara keduanya.

Kosmopolitanisme dan nasionalisme yang berkembang beriringan akan sangat mempengaruhi proses integrasi Eropa. Prinsip-prinsip kosmopolitanisme yang mendorong terciptanya solidaritas antar negara Eropa akan memperkuat proses integrasi Eropa. Sedangkan prinsip nasionalisme yang mendorong terciptanya sikap eksklusif akan melemahkan proses integrasi Eropa. Gejala kosmopolitanisme yang menguat di kalangan pemerintah Prancis memajukan proses integrasi Eropa. Sentimen nasionalisme yang berkembang kuat di kalangan rakyat Prancis melemahkan proses integrasi Eropa.

Kosmopolitanisme Prancis dan Integrasi Eropa

Kosmopolitanisme menjadi *driving force* yang sangat kuat berkembang di Prancis pada periode awal integrasi sampai pemberlakuan Perjanjian Maastricht yang membentuk UE. Pada periode awal integrasi, kosmopolitanisme berkembang di kalangan elit politik Prancis, terutama yang berkecimpung dalam proyek revitalisasi Prancis pasca Perang Dunia II. Setelah Perjanjian Maastricht dibuat dan diberlakukan pada awal dekade 1990-an, kecenderungan kosmopolitanisme di Prancis mengalami penurunan dengan tidak adanya figur politik yang menonjol dalam mendukung proses integrasi. Kosmopolitanisme mulai mengalami penguatan kembali ketika Valery Giscard d'Estaing menjadi penggagas sekaligus perancang draf konstitusi Eropa (<http://www.ena.lu/>, 12 Maret 2009). Sub-bab ini membahas bagaimana pasang surut kosmopolitanisme Prancis mempengaruhi proses integrasi Eropa.

Kosmopolitanisme yang ditunjukkan Prancis pada periode awal proses integrasi, membawa pengaruh besar terhadap dimulainya proses integrasi. Selama kurang lebih empat dekade, Prancis, terutama para elit politiknya, menunjukkan kehendak yang kuat untuk memajukan proses integrasi. Semangat kosmopolitanisme yang besar ditunjukkan oleh pemerintah serta elit politik Prancis ini menjadi motor penggerak proses integrasi, yang mampu menguatkan serta mempercepat proses integrasi. Semangat kosmopolitanisme yang ditunjukkan pemerintah Prancis, mampu menjadi penggerak integrasi, karena semangat kosmopolitanisme mampu menciptakan solidaritas Prancis dengan negara-negara anggota yang lain. Karenanya, selama empat dekade proses integrasi Eropa (sampai diberlakukannya Perjanjian Maastricht), dengan kuatnya semangat kosmopolitanisme yang ditunjukkan pemerintah Prancis, Eropa mampu menjadi sebuah proyek integrasi yang mengalami perkembangan paling pesat. Kuatnya semangat kosmopolitanisme mendorong penguatan integrasi Eropa. Penguatan semangat kosmopolitanisme berjalan seiring dengan penguatan proses integrasi Eropa.

Semangat kosmopolitanisme pertama yang ditunjukkan Prancis untuk mengawali proyek integrasi Eropa yaitu kemauan Prancis untuk memperbaiki hubungan dengan Jerman. Perbaikan hubungan Prancis dan Jerman ini merupakan pintu masuk dibukanya proyek integrasi Eropa. Perbaikan hubungan Prancis dan Jerman memberikan basis solidaritas yang penting dalam proses integrasi, karena Prancis dan Jerman merupakan aktor-aktor utama yang secara aktif berperan dalam proyek integrasi Eropa (Gueldry 2001, 5-6).

Upaya kosmopolitanisme Prancis kemudian berlanjut dalam proyek yang digagas Jean Monnet dan Robert Schuman, yaitu proyek integrasi Eropa. Upaya kosmopolitanisme oleh dua negarawan Prancis tersebut mengawali proses integrasi dalam bentuk *joint production* industri batu bara dan baja dalam *framework* struktur supranasionalisme. Inisiatif Robert Schuman dan Jean Monnet ditanggapi positif oleh Jerman, Italia, dan negara Benelux (*Belgium, Netherland, dan Luxembourg*). Proyek integrasi Eropa terwujud dengan penandatanganan perjanjian pembentukan the European Coal and Steel Community (ECSC) pada 1951 di Paris (<http://www.ena.lu/>, 12 Maret 2009). Perjanjian tersebut berlaku satu tahun kemudian. Struktur supranasionalis terwujud dalam pembentukan *the High Authority* yang terdiri atas perwakilan masing-masing negara anggota pada 10 Agustus 1952. Dalam struktur supranasionalis ECSC yang di dalamnya mencakup *the High Authority* ini, enam negara anggota perintis integrasi Eropa (Prancis, Jerman, Italia, Belgia, Belanda, dan Luxembourg) mengarahkan loyalitas, harapan, dan kegiatan pada institusi *post-national* (yang dimulai dalam bidang perdagangan batu bara dan baja). Pada level perdagangan batu bara dan baja, ECSC mengambil alih yurisdiksi negara anggota untuk melakukan regulasi (Arter 1993, 119-120).

Upaya kosmopolitanisme Prancis berlanjut dengan inisiatif Monnet untuk membentuk the European Defence Community (EDC), sebagai lanjutan proyek integrasi ekonomi dalam ECSC pada tahun 1950. Inisiatif Monnet untuk mengembangkan proyek integrasi ekonomi ke bidang lain, yaitu bidang pertahanan keamanan, sejalan dengan asumsi kaum neofungsionalis tentang logika *spillover* (Ari 2003, 89-91). Dengan logika *spillover* ini, integrasi ekonomi memang akan berlanjut ke integrasi di bidang-bidang lain. Namun sayangnya proyek EDC ini gagal di tangan parlemen Prancis.

Kegagalan proyek EDC tidak menyurutkan semangat kosmopolitanisme Prancis. Setelah EDC gagal, Monnet kembali mengusulkan pengembangan proyek integrasi, yang meliputi *economic union* dan *nuclear energy union*. Proyek *economic union* dan *nuclear energy union* ini semakin memperkuat solidaritas yang dibangun bangsa Eropa pasca-Perang Dunia II. Upaya kosmopolitanisme Prancis ini mempengaruhi kemajuan proses integrasi Eropa dengan penandatanganan Perjanjian Roma yang membentuk EEC dan EAEC atau Euratom pada tahun 1958. Penguatan proses integrasi ditandai dengan perluasan yurisdiksi institusi Eropa, yang semula hanya dalam bidang perdagangan batu bara dan baja, meliputi seluruh bidang ekonomi ditambah dengan bidang energi nuklir. Kemajuan ini dicapai Eropa dalam waktu yang relatif singkat, hanya enam tahun setelah proyek integrasi Eropa dimulai (Arter 1993, 137).

Proses yang relatif cepat dalam pemberlakuan Perjanjian Roma juga dipengaruhi peran the Action Committee for the United States of Europe (ACUSE) yang digagas oleh Monnet pada 1955. Pembentukan ACUSE ini menunjukkan upaya kosmopolitanisme elit politik Prancis. ACUSE terutama berfungsi sentral dalam menciptakan kesadaran masyarakat akan pembentukan pasar bersama dalam EEC. Kesadaran masyarakat akan keuntungan pasar bersama sebagai hasil integrasi Eropa mempercepat proses ratifikasi Perjanjian Roma (<http://www.ena.lu/>, 12 Maret 2009).

Upaya kosmopolitanisme yang ditunjukkan pemerintah Prancis juga nampak ketika proses integrasi Eropa mengalami krisis. Krisis dalam proses integrasi Eropa dipengaruhi pemerintahan Charles De Gaulle yang menunjukkan keengganan dalam mendukung integrasi Eropa. Untuk mengatasi krisis dalam proses integrasi Eropa, pemerintahan Charles De Gaulle bersedia meninjau kembali penguatan hubungan Prancis dan Jerman. Upaya perbaikan hubungan dengan Jerman ini memberikan momentum bagi penyelesaian krisis dalam tubuh EEC (<http://www.ena.lu/>, 12 Maret 2009).

Penguatan kosmopolitanisme Prancis yang menurun dalam pemerintahan Charles De Gaulle, memperoleh momentum kembali pada masa pengganti De Gaulle,

Georges Pompidou. Georges Pompidou bersikap kosmopolit dengan upayanya untuk membawa Prancis lebih dekat dengan Eropa, setelah sebelumnya hubungan Prancis dengan negara-negara Eropa lainnya merenggang. Upaya kosmopolitanisme Pompidou ini menguatkan solidaritas antar bangsa Eropa. Penguatan solidaritas ini diikuti dengan penguatan institusi Eropa. Penguatan institusi Eropa setelah mengalami krisis terwujud dengan penyatuan tiga badan integrasi, ECSC, EEC, dan EAEC ke dalam satu institusi yaitu EC pada bulan Juli 1967 (Urwin 2006).

Dalam sebuah konferensi pers yang dihelat pada 10 Juli 1969, Pompidou menyerukan pertemuan kepala negara anggota untuk membahas krisis yang terjadi dalam EC. Pompidou juga mengusulkan prioritas baru yang harus dilakukan EC untuk semakin memperkuat upaya integrasi Eropa. Pompidou menyebut seruannya sebagai upaya *Completion, Deepening, and Enlargement* (Penyelesaian, Pendalaman, dan Perluasan) (<http://www.ena.lu/>, 12 Maret 2009). Penguatan EC terwujud dengan kesepakatan perluasan bidang kerjasama dalam EC yang meliputi bidang teknologi, keuangan, dan transportasi, pembentukan sistem keuangan, serta pembentukan kerangka kerjasama kebijakan luar negeri. Kesepakatan-kesepakatan tersebut menunjukkan penguatan institusi EC dengan diperluasnya yurisdiksi EC sebagai institusi pusat integrasi Eropa pada era Pompidou.

Penguatan proses integrasi Eropa yang dipengaruhi oleh kosmopolitanisme yang ditunjukkan oleh pemerintah Prancis juga berlangsung pada era pengganti Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing. Penguatan proses integrasi Eropa yang berlangsung pada era d'Estaing terutama terjadi dalam penguatan institusi EC dengan dibentuknya parlemen Eropa sebagai lembaga legislatif pada tahun 1987 (Urwin 2006). Pembentukan parlemen Eropa menunjukkan semakin kuatnya proses integrasi.

Kosmopolitanisme Prancis yang mempengaruhi penguatan integrasi Eropa dapat diidentifikasi dengan jelas ketika negara-negara Eropa yang tergabung dalam EC memulai pembahasan mengenai pembentukan *single market*. Upaya yang digagas Jacques Delors ini menunjukkan kuatnya pengaruh para elit politik Prancis dalam kemajuan integrasi Eropa (Arter 1993, 199). Upaya pembentukan *single market* menunjukkan penguatan dalam proses integrasi Eropa karena *single market* menunjukkan terselesaikannya integrasi ekonomi. Dengan demikian yurisdiksi EC sebagai institusi pusat dalam proses integrasi Eropa semakin menguat.

Proses pembentukan *single market* tidak bisa dilepaskan dari kuatnya upaya kosmopolitanisme yang ditunjukkan Jacques Delors, politisi Prancis yang menjabat presiden Komisi Eropa, dan dukungan presiden François Mitterrand terhadap upaya pembentukan *single market*. Upaya kosmopolitanisme yang

dilakukan Delors menghasilkan pembentukan SEA yang ditandatangani kepala negara anggota EC pada bulan Februari 1986 (<http://www.ena.lu/>, 12 Maret 2009). Penandatanganan SEA merupakan langkah maju dalam proses integrasi karena SEA merupakan kesepakatan pembentukan *single market* dengan dihilangkannya batas-batas fisik, teknik, dan fiskal dalam pasar bersama Eropa.

Presiden Prancis Francois Mitterrand dalam upaya-upaya kosmopolitnya juga mempengaruhi penguatan proses integrasi Eropa. Upaya kosmopolitanisme yang mengusulkan IGC bersama Kanselir Jerman Helmut Kohl menghasilkan percepatan proses integrasi politik dan diperluasnya bidang kerjasama dalam integrasi Eropa ke bidang lingkungan, energi, teknologi, dan perlindungan konsumen. Proses integrasi politik dalam EC juga terwujud penguatan otoritas EC dalam kebijakan imigrasi, visa, *asylum*, dan penanganan kriminalitas internasional. Kesepakatan yang dicapai dalam IGC tersebut menghasilkan penandatanganan Perjanjian Maastricht sebagai perjanjian pembentukan Uni Eropa pada 7 Februari 1992 (Urwin 2006).

Perjanjian Maastricht yang membentuk Uni Eropa menandai penguatan proses integrasi Eropa. Proses ratifikasi Perjanjian Maastricht oleh negara anggotanya berlangsung cukup singkat dalam waktu satu tahun. Sehingga, pada 1993 perjanjian ini telah diberlakukan. Penguatan proses integrasi ini juga tidak dapat dilepaskan dari upaya kosmopolitanisme yang ditunjukkan Presiden Prancis, Francois Mitterrand (Gueldry 2001, 7). Melihat adanya kecenderungan penolakan ratifikasi Perjanjian Maastricht di tubuh parlemen, Mitterrand memutuskan diadakannya referendum dalam ratifikasi Perjanjian Maastricht. Melalui kampanye yang didukung Mitterrand, referendum membuahkan kesuksesan dengan kemenangan kubu 'yes' terhadap ratifikasi Perjanjian Maastricht.

Setelah Perjanjian Maastricht diberlakukan, upaya-upaya kosmopolitanisme tetap ditunjukkan elit politik di Prancis, terutama presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Upaya kosmopolitanisme yang memperkuat proses integrasi juga ditunjukkan oleh politisi Prancis yang berkecimpung dalam pembuatan kebijakan dalam Uni Eropa.

Upaya kosmopolitanisme yang ditunjukkan pemerintah eksekutif di Prancis terlihat dalam proses negosiasi Perjanjian Schengen serta pemberlakuan *Euro* sebagai mata uang tunggal di Eropa. Upaya kosmopolitanisme Prancis terutama terlihat dalam negosiasi mengenai pemberlakuan persetujuan Schengen. Dukungan Prancis terhadap pengadopsian persetujuan Schengen memperkuat proses integrasi Eropa (<http://www.ena.lu/>, 12 Maret 2009). Persetujuan Schengen mampu memperkuat proses integrasi Eropa, karena persetujuan ini membawa konsekuensi dibukanya pemeriksaan di perbatasan.

Penguatan integrasi Eropa yang dipengaruhi upaya kosmopolitanisme Prancis juga terlihat dalam proses pengadopsian *Euro* sebagai mata uang tunggal Uni Eropa dengan EMU sebagai sistemnya. Antusiasme yang ditunjukkan Prancis sebagai salah satu negara dengan perekonomian kuat dalam Uni Eropa, mempercepat proses pengadopsian *Euro* oleh negara-negara anggota yang lain. *Euro* diadopsi sebagai mata uang tunggal dalam Uni Eropa pada 1 Januari 1999 (Microsoft Encarta 2007). Pengadopsian *Euro* ini memperkuat integrasi ekonomi dalam bentuk *single market* yang telah dicapai UE. Keputusan Prancis untuk mengadopsi mata uang tunggal ini dapat dipandang sebagai kecenderungan kosmopolitanisme, karena pengadopsian mata uang tunggal membawa beberapa konsekuensi. Pertama, dengan mengadopsi *Euro*, Prancis tidak lagi memiliki mata uang nasional. Kedua, Prancis tidak lagi dapat menetapkan kebijakan moneter, yang diatur dalam kerangka the European System of Central Bank (ESCB) (Nugent 2006, 364). Kesiapan Prancis untuk menanggung konsekuensi tersebut menunjukkan solidaritas dan konsistensi dukungan Prancis terhadap proses integrasi Eropa.

Upaya kosmopolitanisme Prancis berlanjut dalam proses pembentukan perjanjian draf konstitusi Eropa. Upaya kosmopolitanisme Prancis sebagai inisiator dalam pembentukan konstitusi Eropa terlihat dalam peran mantan Presiden Prancis, Valéry Giscard d'Estaing sebagai ketua dalam konvensi pembentukan konstitusi tersebut. Perjanjian pembentukan Konstitusi Eropa ditandatangani oleh 25 negara anggota Uni Eropa pada 29 Oktober 2004 (<http://www.ena.lu/>, 12 Maret 2009). Penandatanganan perjanjian pembentukan Konstitusi Eropa ini menunjukkan penguatan proses integrasi Eropa. Konstitusi Eropa akan menjadi perwujudan dalam tahap akhir proses integrasi, yaitu integrasi politik dalam Uni Eropa.

Nasionalisme Prancis dan Integrasi Eropa

Nasionalisme Prancis menjadi *driving force* yang juga berkembang selama proses integrasi Eropa. Seperti halnya kosmopolitanisme, nasionalisme Prancis juga dapat diidentifikasi sejak awal proses integrasi Eropa. Jika kosmopolitanisme terutama ditunjukkan oleh elit-elit politik serta pemerintah eksekutif di Prancis, nasionalisme terutama ditunjukkan oleh politisi yang duduk di parlemen serta rakyat Prancis pada umumnya. Presiden Prancis sebagai pemerintah eksekutif yang menunjukkan semangat nasionalisme tinggi yaitu Charles De Gaulle. Upaya-upaya yang dilakukan De Gaulle untuk melindungi nasionalisme Prancis memberikan inspirasi bagi partai-partai politik Prancis, terutama yang dilandasi ideologi nasionalisme. Sub-bab ini membahas bagaimana perkembangan nasionalisme di Prancis mempengaruhi proses integrasi Eropa.

Nasionalisme Prancis sebagai sebuah *driving force* yang berkembang di tengah

kuatnya arus proses integrasi Eropa memunculkan sentimen-sentimen *eurosceptics* di kalangan parlemen dan rakyat Prancis. Sentimen-sentimen *eurosceptics* ini mampu melemahkan proses integrasi Eropa. Sentimen *eurosceptics* akan mampu melemahkan proses integrasi, karena sentimen ini mencegah aktor-aktor politik di Prancis mengarahkan loyalitasnya ke institusi pusat di Eropa. Sebaliknya, loyalitas akan diberikan kepada negara-bangsa (Prancis) sebagai pemegang kedaulatan. Dengan demikian, nasionalisme yang berkembang di Prancis akan menjadi penghambat proses integrasi Eropa.

Penguatan nasionalisme Prancis dalam proses integrasi Penolakan tersebut diambil melalui pemungutan suara pada 30 Agustus 1954 dengan hasil 264 dari 319 anggota parlemen memutuskan untuk menolak pembentukan tentara Eropa melalui EDC (<http://www.ena.lu/>, 12 Maret 2009) Penolakan ratifikasi pembentukan EDC oleh parlemen Prancis ini menunjukkan kuatnya sikap *eurosceptics* dalam parlemen Prancis. Penolakan ini mengakibatkan terhambatnya proses integrasi, terutama dalam integrasi pertahanan keamanan di Eropa. Sampai saat ini, integrasi dalam bidang pertahanan keamanan masih sangat sulit dicapai di Eropa. Karena negara-negara anggota, seperti Prancis, menganggap integrasi pertahanan keamanan akan mengganggu kedaulatan negaranya.

Penguatan nasionalisme di Prancis sebelum Perjanjian Maastricht diberlakukan juga tampak dalam era pemerintahan presiden Charles De Gaulle. Nasionalisme ditunjukkan Charles De Gaulle dalam arah kebijakannya terkait dengan proses integrasi Eropa. Tidak seperti presiden-presiden lain yang mendukung supranasionalisme dalam proses integrasi Eropa, Charles De Gaulle mengambil sikap kontra terhadap supranasionalisme. Charles De Gaulle mendorong kerjasama yang bersifat antar pemerintah sebagai alternatif supranasionalisme (Tekin 2008, 134).

Pandangan-pandangan serta sikap Charles De Gaulle yang nasionalis menghambat proses integrasi Eropa. Hambatan dalam proses integrasi Eropa itu terlihat dalam krisis yang dihadapi EEC selama Charles De Gaulle menjabat sebagai presiden Prancis. Krisis mencapai puncaknya dalam masa yang disebut sebagai *empty chair crisis*, ketika Prancis yang ketika itu menjabat sebagai presiden *European Council* mengundurkan diri dari jabatan tersebut. *Empty chair crisis* ini menjadi krisis serius yang menghambat proses integrasi Eropa pada pertengahan dekade 1960 (Arter 1993, 200-201).

Penolakan Charles De Gaulle terhadap pembentukan parlemen Eropa menunjukkan semangat nasionalisme yang akhirnya menghambat proses integrasi Eropa, terutama di bidang politik. Penolakan De Gaulle ini terutama terkait dengan penguatan institusi Eropa yang akan mengancam kedaulatan Prancis

sebagai negara. Penolakan Charles De Gaulle menghambat proses pembentukan parlemen di Eropa yang merupakan langkah untuk menuju proses integrasi politik. Setelah pemerintahan Charles De Gaulle sampai diberlakukannya Perjanjian Maastricht, tidak ditemukan kecenderungan nasionalisme yang mampu mempengaruhi proses integrasi Eropa.

Perjanjian Maastricht membawa dampak lebih dekatnya proses integrasi dengan warga negara Eropa. Kedekatan proses integrasi dengan kehidupan sehari-hari warga negara mengubah sikap publik terkait dengan proses integrasi Eropa. Setelah Perjanjian Maastricht, semangat nasionalisme di kalangan warga negara Prancis ditunjukkan melalui beberapa indikator.

Pertama, penurunan dukungan warga negara Prancis terhadap keanggotaan negaranya dalam Uni Eropa. Penurunan dukungan warga negara Prancis terhadap proses integrasi Eropa terlihat dalam hasil survei Eurobarometer. Survei dilakukan dari tahun ke tahun dengan mengajukan pertanyaan pada warga negara Prancis, apakah keanggotaan negaranya dalam UE merupakan hal yang baik, buruk, ataukah tidak keduanya. Hasilnya pada survei yang dilakukan setelah Perjanjian Maastricht, proporsi responden yang menjawab bahwa keanggotaan Prancis merupakan hal yang buruk meningkat, jika dibandingkan dengan hasil survei pada dekade 1980an. Proporsi responden yang menjawab keanggotaan Prancis dalam UE merupakan hal buruk pada dekade 1980-an selalu di bawah 10%, sedangkan setelah Perjanjian Maastricht (tahun 1990 sampai 2002) proporsi tersebut meningkat menjadi antara angka 8% sampai 19%, dengan rata-rata 13% responden (Flood 2005 dalam Drake 2005, 37). Menurut Flood (2005 dalam Drake 2005, 37) penurunan dukungan setelah Perjanjian Maastricht terus berlangsung secara signifikan, sehingga dukungan rakyat Prancis terhadap UE tidak pernah kembali menjadi tinggi seperti halnya di era 1980-an. Pada era 1980-an, angka dukungan rakyat terhadap keanggotaan di UE tergolong tinggi, didorong oleh kesuksesan Jacques Delors dan Francois Mitterrand dalam memajukan integrasi Eropa melalui penciptaan *single market*. Indikator ini menunjukkan gejala menguatnya sikap *euroseptics* di kalangan warganegara, yang menjadi penanda menguatnya nasionalisme.

Indikator lain yang menunjukkan gejala penguatan nasionalisme yaitu menguatnya sentimen identitas nasional yang bersifat eksklusif di kalangan warga negara Prancis. Dalam studi yang dilakukan Schild (2001, 344-347) mengenai identitas nasional warga negara Prancis terkait dengan perkembangan integrasi Eropa, diperoleh hasil bahwa setelah Perjanjian Maastricht, terjadi penguatan identitas nasional di Prancis. Penguatan identitas nasional tersebut ditunjukkan dengan semakin menguatnya kesenjangan antara identitas nasional warga negara Prancis dan identitas gandanya sebagai warga negara Eropa. Studi Schild tersebut menunjukkan bahwa identitas sebagai warga Eropa berlawanan dengan identitas

sebagai warga negara Prancis. Dengan kata lain, warga negara dihadapkan pada pilihan identitas, pada identitas nasionalnya sebagai warga negara Prancis atau warga negara Eropa. Hasilnya menunjukkan gejala penguatan identitas nasional di kalangan warga negara Prancis.

Namun sayangnya penguatan sikap *eurosceptics* dan nasionalisme di kalangan warga negara Prancis setelah Perjanjian Maastricht memiliki pengaruh yang kurang signifikan terhadap proses integrasi Eropa. Hal ini disebabkan karena pengambilan kebijakan Prancis terhadap proses integrasi Eropa berada di tangan pemerintah eksekutif yang bersikap kosmopolit. Sikap *eurosceptics* dan penguatan nasionalisme di kalangan warga negara Prancis ini bertentangan dengan sikap pemerintah yang mendukung proses integrasi Eropa.

Penguatan nasionalisme dan sikap *eurosceptics* yang terjadi di kalangan warga negara juga terjadi di kalangan parlemen Prancis. Sikap *eurosceptics* berkembang hampir di seluruh partai Prancis yang menduduki parlemen, baik yang berhaluan ekstrem kiri maupun ekstrim kanan. Perdebatan mengenai ratifikasi Perjanjian Maastricht memunculkan tren *eurosceptics* yang kuat dalam parlemen Prancis. Bahkan, dalam partai yang sebelumnya sangat pro-Eropa seperti UDF, gelombang *euroscepticism* menguat. Phillipe de Villiers meninggalkan UDF dan mendirikan partai baru, Mouvement pour la France (MPF), karena ia menganggap proses integrasi Eropa telah mengancam kedaulatan Prancis. Sedangkan *the Gaullist movement* secara konsisten mengembangkan sikap *eurosceptics* yang diilhami oleh pandangan Charles De Gaulle mengenai kedaulatan Prancis (Tekin 2008, 142).

Sikap *eurosceptics* mayoritas partai di parlemen Prancis terlihat dalam isu ratifikasi Perjanjian Maastricht, pengadopsian *Euro*, dan penerapan persetujuan Schengen (Flood 2005 dalam Drake 2005, 48). Mayoritas partai politik di Prancis menentang ratifikasi Perjanjian Maastricht. Namun karena pemerintah eksekutif di bawah presiden Francois Mitterrand melihat ancaman penolakan parlemen, ratifikasi Perjanjian Maastricht kemudian dilakukan melalui referendum. Sikap *eurosceptics* dalam parlemen juga terlihat dalam penolakan mayoritas parlemen terhadap pengadopsian *Euro* sebagai mata uang tunggal dalam UE. Penolakan terhadap persetujuan Schengen juga terjadi hampir di seluruh kubu politik dalam parlemen Prancis, yang dianggap dapat mengganggu kedaulatan Prancis (Flood 2005 dalam Drake 2005, 48).

Penguatan nasionalisme dan sikap *eurosceptics* di kalangan parlemen Prancis ini juga tidak membawa pengaruh yang signifikan terhadap proses integrasi Eropa. Pengambilan keputusan terkait dengan ratifikasi Perjanjian Maastricht, pengadopsian *euro*, dan penerapan persetujuan Schengen yang memperkuat proses integrasi Eropa berada di tangan pemerintah eksekutif.

Penguatan nasionalisme dan sikap *eurosceptics* di kalangan warga negara Prancis mampu mempengaruhi proses integrasi Eropa ketika ratifikasi perjanjian pembentukan Konstitusi Eropa dilakukan melalui referendum. Referendum yang menghasilkan penolakan terhadap pembentukan Konstitusi Eropa oleh 54,7% rakyat Prancis menunjukkan penguatan nasionalisme (Ashiddiqie 2007, 10). Penolakan serupa juga datang dari mayoritas partai politik dalam parlemen Prancis (Milner 2006). Penguatan nasionalisme Prancis ini menghambat proses integrasi politik Eropa, yang akhirnya melemahkan proses integrasi. Kegagalan pembentukan Konstitusi Eropa menjadikan proses integrasi politik tidak dapat tercapai pada tahun 2005.

Perbenturan Kosmopolitanisme dan Nasionalisme dalam Proses Integrasi Eropa

Perbenturan antara kosmopolitanisme dan nasionalisme terjadi pada poin ratifikasi pembentukan EDC, proses ratifikasi Perjanjian Maastricht, pengadopsian Euro, penerapan persetujuan Schengen, dan proses ratifikasi draf pembentukan Konstitusi Eropa. Pada poin ratifikasi pembentukan EDC, kosmopolitanisme ditunjukkan Jean Monnet dari kalangan eksekutif Prancis yang mengagaskan pembentukan EDC sebagai proyek integrasi pertahanan keamanan Eropa. Sedangkan nasionalisme ditunjukkan mayoritas anggota parlemen Prancis yang menolak ratifikasi pembentukan EDC melalui voting. Pada poin ini, nasionalisme menjadi *driving force* yang berpengaruh lebih dominan terhadap proses integrasi, terutama dalam bidang pertahanan keamanan. Nasionalisme melemahkan proses integrasi dengan kegagalan pembentukan EDC.

Dalam proses ratifikasi Perjanjian Maastricht, kosmopolitanisme ditunjukkan presiden Francois Mitterrand lewat upayanya menyukseskan ratifikasi dengan mengadakan referendum untuk meratifikasi perjanjian tersebut. Upaya ini dilakukan Mitterrand karena melihat kecenderungan nasionalisme dalam parlemen, dimana mayoritas partai menunjukkan keengganan untuk mendukung Perjanjian Maastricht. Perjanjian Maastricht merupakan tonggak penting dalam proses integrasi Eropa, dimana proses integrasi ekonomi melalui pembentukan *single market* telah terlampaui. Pada poin ini, kosmopolitanisme menjadi *driving force* yang lebih berpengaruh dalam proses integrasi, terutama dalam integrasi ekonomi. Proses integrasi ekonomi Eropa semakin maju dengan diberlakukannya Perjanjian Maastricht.

Pada poin pengadopsian Euro, nasionalisme terlihat pada mayoritas partai politik di Prancis menunjukkan penolakan terhadap pengadopsian Euro dan pemberlakuan European Monetary Union (EMU). Namun, pemerintah eksekutif

di Prancis menunjukkan kecenderungan kosmopolitanisme dengan mendukung pengadopsian Euro. Pada poin ini, kosmopolitanisme menjadi *driving force* dominan dengan menguatkan proses integrasi ekonomi Eropa, dengan diadopsinya Euro sebagai mata uang bersama pada 1 Januari 1999.

Penolakan parlemen yang menunjukkan nasionalisme dan dukungan pemerintah eksekutif yang menunjukkan kosmopolitanisme juga terjadi pada proses pengadopsian persetujuan Schengen ke dalam Perjanjian Amsterdam. Pada poin ini, kosmopolitanisme kembali menjadi *driving force* yang lebih dominan dari nasionalisme, dengan diadopsinya persetujuan Schengen yang membawa proses integrasi Eropa lebih maju.

Perbenturan nasionalisme dan kosmopolitanisme kembali terjadi dalam proses ratifikasi draf konstitusi Eropa lewat referendum pada tahun 2005. Pada poin ini, kosmopolitanisme ditunjukkan oleh elit politik Prancis, Valéry Giscard d'Estaing yang ikut menggagas dan merancang draf konstitusi Eropa. Kosmopolitanisme juga ditunjukkan pemerintah eksekutif Prancis yang ikut menandatangani perjanjian pembentukan konstitusi Eropa pada tahun 2004. Sedangkan kecenderungan nasionalisme dan kosmopolitanisme ditunjukkan oleh rakyat Prancis dan partai-partai politik di Prancis. Rakyat Prancis menunjukkan nasionalisme melalui penolakan terhadap ratifikasi perjanjian pembentukan konstitusi Eropa melalui referendum pada bulan Mei 2005. Sedangkan parlemen Prancis menunjukkan penolakan serupa. Pada poin ini, nasionalisme menjadi *driving force* yang lebih dominan mempengaruhi proses integrasi. Ratifikasi draf konstitusi Eropa menunjukkan langkah menuju proses integrasi politik. Nasionalisme yang ditunjukkan rakyat Prancis menghambat langkah Eropa menuju proses integrasi politik.

Kesimpulan

Dari perbenturan antara kosmopolitanisme dan nasionalisme, dapat dilihat bagaimana kosmopolitanisme dan nasionalisme mempengaruhi proses integrasi Eropa. Kosmopolitanisme yang ditunjukkan pemerintah Prancis, terutama pemerintah eksekutif mampu menjadi *driving force* yang menguatkan proses integrasi Eropa. Kosmopolitanisme yang ditunjukkan pemerintah Prancis selama proses integrasi Eropa, sampai penandatanganan perjanjian pembentukan Konstitusi Eropa memberikan basis solidaritas yang kuat bagi penguatan integrasi mengingat peran Prancis yang dominan dalam proses integrasi Eropa.

Kosmopolitanisme yang ditunjukkan pemerintah Prancis mampu mempengaruhi penguatan proses integrasi Eropa, karena kosmopolitanisme mengarahkan kebijakan luar negeri Prancis yang pengambilan keputusannya berada di tangan

pemerintah eksekutif. Dalam kebijakan luar negerinya pemerintah eksekutif Prancis hampir selalu menunjukkan dukungan kuat terhadap proses integrasi. Dukungan kuat tersebut menunjukkan solidaritas Prancis terhadap integrasi Eropa. Selama proses integrasi yang berlangsung lebih dari lima puluh tahun, pemerintah eksekutif Prancis memiliki kekuasaan besar untuk menentukan arah kebijakan Prancis terhadap integrasi Eropa.

Upaya kosmopolitanisme pemerintah Prancis berkembang dalam dukungannya terhadap seluruh area integrasi, baik integrasi politik maupun integrasi ekonomi. Namun kosmopolitanisme sebagai *driving force* memperkuat proses integrasi hanya dalam integrasi di bidang ekonomi, serta bidang-bidang lain yang bersifat *low politics* seperti bidang energi, teknologi, lingkungan, dan sebagainya. Dalam bidang *high politics*, seperti integrasi di bidang politik atau pertahanan keamanan, proses integrasi Eropa terhambat dengan adanya nasionalisme Prancis.

Nasionalisme yang berkembang di kalangan anggota parlemen dan masyarakat Prancis kurang dapat mempengaruhi proses integrasi Eropa, karena pengambilan keputusan terkait dengan arah kebijakan Prancis terhadap integrasi Eropa dipegang oleh pemerintah eksekutif yang cenderung bersikap kosmopolit. Meski demikian, nasionalisme mampu mempengaruhi proses integrasi, terutama di bidang *high politics* seperti integrasi politik dan pertahanan keamanan, karena proses integrasi politik membutuhkan legitimasi yang berasal dari parlemen serta rakyat Prancis. Nasionalisme yang ditunjukkan rakyat dan Parlemen Prancis, menunjukkan sikap eksklusif Prancis yang tidak ingin kehilangan identitas serta kedaulatan dalam proses integrasi politik di Eropa. Sikap eksklusif ini membangun kesenjangan dengan negara-negara anggota yang lain, dan pada akhirnya melemahkan proses integrasi Eropa.

Kosmopolitanisme dan nasionalisme merupakan *driving force* yang mampu mempengaruhi proses integrasi. Proses integrasi Eropa dapat maju ketika kosmopolitanisme menjadi *driving force* yang dominan. Namun sampai saat ini proses integrasi Eropa belum dapat mencapai hasil akhirnya, yaitu pencapaian integrasi politik dengan UE sebagai institusi supranasional, selama nasionalisme masih berkembang kuat di kalangan warga negara Eropa. Studi kasus di Prancis menunjukkan masih kuatnya semangat nasionalisme di kalangan warga negara, yang dapat menghambat laju integrasi, terutama integrasi politik di Eropa.

Daftar Pustaka

Buku dan Artikel dalam Buku

- Arter, David, 1993. *The Politics of European Integration in the Twentieth Century*. Vermont: Dartmouth Publishing Company Limited.
- Baylis, John dan Smith, Steve, ed. 2001. *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*. Oxford: Oxford University Press.
- Heater, Derek, 2002. Historical Patterns. dalam *World Citizenship: Cosmopolitan Thinking and Its Opponents*. London: Continuum.
- Schmitter, Philippe C., 2005. Neo-Neofunctionalism. dalam Wiener, Antje dan Thomas Diez, 2005. *European Integration Theory*. Oxford: Oxford University Press.
- Susanto, Joko, 2009. *Putting Nationalism between Cosmopolitanism and Fundamentalism: A Theoretical Framework*. dalam *Handout Topics Kosmopolitanisme, Nasionalisme, dan Fundamentalisme*. Surabaya: FISIP Universitas Airlangga.

Artikel Jurnal

- Asshiddiqie, Jimly, 2007. Konstitusi Uni Eropa dan Masa Depan. *Jurnal Kajian Wilayah Eropa: Masa Depan Konstitusi Uni Eropa*, **III** (1).
- Luhulima C.P.F., 2007. Masalah Traktat Konstitusi Uni Eropa. *Jurnal Kajian Wilayah Eropa: Masa Depan Konstitusi Uni Eropa*, **III** (1).

Artikel Online

- Ari, Turker, 2003. The European Defence Community in the U.S. Foreign Policy Context. [online]. dalam <http://www.sam.gov.tr/perceptions/Volume9/March-May2004/6TurkerAri.pdf> [diakses 19 Mei 2009].
- Auer, Stefan, 1997. Two Types of Nationalism. *Russian and Euro Asian Bulletin*, **7** (12). Desember. [online]. dalam <http://www.cerc.unimelb.edu.au/bulletin/buldec97.pdf> [diakses 19 September 2008].
- Fine, Robert dan Will Smith. Beyond Liberal Nationalism: Jurgen Habermas on Cosmopolitan Justice. [online]. dalam http://www.allacademic.com/meta/p74387_index.html [diakses 12 Maret 2009].

- Flood, Chris, 2005. French Euroscepticism and the Politics of Indifference. dalam Drake, Helen ed., 2005. *French Relations with the European Union*. [e-book]. London and New York: Routledge Taylor and Francis Group. 2005. dalam www.gigapedia.com [diakses pada 3 Maret 2009].
- Gueldry, Michel R., 2001. *France and European Integration: Toward a Transnational Polity*. [E-book]. London: Praeger Westport Connecticut. dalam [www.gigapedia.com/ E-books](http://www.gigapedia.com/E-books) [diakses 3 Maret 2009].
- Kaldor, Mary, 2004. Nationalism and Globalisation. [online]. dalam <http://www.lse.ac.uk/Depts/global/Publications/PublicationsProfKaldor/NationalismandGlobalisationbyMaryKaldor.pdf> [diakses 19 September 2008].
- McGowan, Lee, 2007. Theorizing European Integration: Revisiting Neofunctionalism and Testing Its Suitability for Explaining the Development of EC Competition Policy? [online]. dalam http://eiop.or.at/eiop/index.php/eiop/article/view/2007_003a/50 [diakses 19 Desember 2008].
- Milner, Henry, 2006. "YES to the Europe I want; NO to this one.": Some Reflections on France's Rejection of the EU Constitution. [online]. dalam <http://journals.cambridge.org/action/display;jsessionid=98EA206FA87C994E7AF62FE3A6E304E7.tomcat1?fromPage=online&aid=428302.pdf> [diakses 19 September 2008].
- Nugent, Neill, 2006. The Government and Politics of the European Union. [online]. dalam http://books.google.co.id/books?id=Z3fthrUsT70C&dq=France+and+EMU&source=gbs_summary_s&cad=0 [diakses 15 April 2009].
- Ribeiro, Gustavo Lins, 2009. What is Cosmopolitanism? [online]. dalam http://www.vibrant.org.br/downloads/v2n1_wc.pdf [diakses pada 3 Maret 2009].
- Schild, Joachim, 2001. National v European Identities? French and Germans in the European Multi-Level System. *Journal of Common Market Studies*, **39** (2). [online]. dalam http://oxpo.politics.ox.ac.uk/materials/D-F_Publication-National-European_Identifications.pdf [diakses 19 Desember 2008].
- Tekin, Beyza C., 2008. France and European Integration: an Uneasy Relationship. [online]. dalam <http://www.iticu.edu.tr/kutuphane/dergi/s13/131-146.pdf>. [diakses 12 Maret 2009].

Situs Resmi Online

European Navigator, 2009. The History of a United Europe on the Internet. [online]. dalam <http://www.ena.lu/> [diakses 12 Maret 2009].

European Union, 2009. [online]. dalam http://europa.eu/abc/symbols/9-may/decl_en.htm [diakses 14 Maret 2009].

French Ministry of Foreign and European Affairs, France Diplomatie, France and European Integration 2009. [online]. dalam http://www.diplomatie.gouv.fr/en/france_159/france-in-the-world_6820/europe_6905/france-and-european-integration_1470.html [diakses 12 Maret 2009].

DVD

Adams, William James et al., 2006. *France*. Microsoft Student 2007. [DVD]. Redmon, WA: Microsoft Corporation.

Burke, Robert E., dan Richard M. Pious, 2006. *Referendum*. Microsoft® Student 2007. [DVD]. Redmond, WA: Microsoft Corporation.

Kaiser, Thomas E., 2006. *French Revolution*. Microsoft® Student 2007. [DVD]. Redmond, WA: Microsoft Corporation.

Urwin, Derek W., 2006. *European Union*. Microsoft Student 2007. [DVD]. Redmon, WA: Microsoft Corporation.